

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data

4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian

Hasil penelitian ini diperoleh dari pengumpulan data berupa kuesioner dengan responden berdasarkan wajib pajak yang ada di daerah Kota Bandar Lampung yang terdapat di Jl. Dr. Susilo No. 02 Bandar Lampung. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang terdaftar di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung yaitu 247.620 wajib pajak. Berikut data yang diperoleh dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung.

Tabel 4.1

Data Wajib Pajak Tahun 2017

Wajib Pajak	Ketetapan
247.620	Rp. 112.244.259.828

Sumber : BPPRD Kota Bandar Lampung 2018

Tabel 4.2

Data Pajak Tahun 2017

Realisasi	Jumlah Realisasi	Tunggakan yang Tidak Terealisasi	Jumlah Tunggakan
149.662	Rp. 72.386.454.826	97.958	Rp. 39.857.805.002

Sumber : BPPRD Kota Bandar Lampung 2018

Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan teknik analisis yang dipilih untuk mencapai tujuan penelitian. Untuk menentukan kuesioner yang akan disebarakan kepada responden dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan rumus slovin, yaitu sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(e^2)}$$

$$n = \frac{247.620}{1 + 247.520(0,10)^2}$$

$$n = \frac{247.620}{2.477,2}$$

$$n = 99,9596 = 100$$

Tingkat kepercayaan yang digunakan dalam penelitian ini sebesar 10%. Sampel pada penelitian ini sebanyak 100 orang. Setelah seluruh data dan informasi berhasil dikumpulkan proses klasifikasi hasil penyebaran angket dilakukan dengan bantuan program Excel untuk membentuk tabulasi data. Setelah tahapan tersebut selesai tahapan pengolahan segera dilaksanakan. Berdasarkan hasil penyebaran angket maka karakteristik responden didasarkan pada :

- a. Profil responden berdasarkan jenis kelamin

Tabel 4.3
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1.	Laki-laki	81	81%
2.	Perempuan	19	19%
	Jumlah	100	100%

Sumber: Data Primer yang diolah (2018)

Dari hasil angket yang telah disebarakan, terlihat dalam tabel 4.3 di atas yaitu

didapat bahwa responden laki-laki sebanyak 81 orang atau sebesar 81%, sedangkan responden perempuan sebanyak 19 orang atau sebesar 19%. Dapat disimpulkan bahwa responden pria lebih banyak dari pada responden perempuan.

b. Profil responden berdasarkan status

Tabel 4.4
Karakteristik Responden Berdasarkan Status

No.	Status	Jumlah	Persentase (%)
1.	Menikah	94	94%
2.	Belum menikah	6	6%
	Jumlah	100	100%

Sumber: Data Primer yang diolah (2018)

Berdasarkan hasil angket yang disebarakan terlihat pada tabel 4.4 diatas yaitu didapat responden yang memiliki status menikah sebanyak 94 orang atau sebesar 94% dan responden yang memiliki status belum menikah sebanyak 6 orang atau sebesar 6%. Jadi dapat disimpulkan bahwa lebih banyak responden yang menikah dibandingkan dengan responden yang belum menikah dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

c. Profil responden berdasarkan usia responden

Tabel 4.5
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

No.	Usia	Jumlah	Persentase (%)
1.	20-30	7	7%
2.	31-40	36	36%
3.	41-50	33	33%
4.	>50	24	24%
	Total	100	100%

Sumber: Data Primer yang diolah (2018)

Dari hasil angket yang telah disebar, terlihat dalam tabel 4.5 diatas yaitu di dapat responden yang rentang usianya 20-30 sebanyak 7 orang atau sebesar 7%, responden yang usianya 31-40 sebanyak 36 orang atau sebesar 36%, responden yang berusia 41-50 sebanyak 33 orang atau sebesar 33%, dan responden yang usianya >50 sebanyak 24 orang atau sebesar 24%.

d. Profil responden berdasarkan tingkat pendidikan

Tabel 4.6

Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1.	SMA	65	65%
2.	D3	10	10%
3.	S1	24	24%
4.	S2	1	1%
5	Lainnya	-	
	Total	100	100%

Sumber: Data Primer yang diolah (2018)

Berdasarkan hasil angket yang disebar terlihat pada tabel 4.6 diatas yaitu didapat responden yang memiliki tingkat pendidikan SMA sebanyak 65 orang atau sebesar 65%, responden yang tingkat pendidikannya D3 sebanyak 10 orang atau 10%, responden yang tingkat pendidikannya S1 sebanyak 24 orang atau 24%, responden yang tingkat pendidikannya S2 sebanyak 1 orang atau 1%.

e. Profil responden berdasarkan lama menjadi wajib pajak

Tabel 4.7

Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Menjadi Wajib Pajak

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1.	1-5 tahun	11	11%
2.	6-10 tahun	37	37%
3.	11-15 tahun	30	30%
4.	> 15 tahun	22	22%
	Total	100	100%

Sumber: Data Primer yang diolah (2018)

Berdasarkan hasil angket yang disebarakan terlihat pada tabel 4.7 diatas yaitu didapat responden yang lama menjadi wajib pajak 1-5 tahun sebanyak 11 orang atau sebesar 11%, responden yang lama menjadi wajib pajak 6-10 tahun sebanyak 37 orang atau 37%, responden yang lama menjadi wajib pajak 11-15 tahun sebanyak 30 orang atau 30%, responden yang lama menjadi wajib pajak > 15 tahun sebanyak 22 orang atau 22%.

4.1.2 Deskripsi Variabel Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh pemahaman wajib pajak, sanksi perpajakan, tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum, nasionalisme dan kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB. Jumlah sampel tidak didasarkan pada seluruh populasi wajib pajak yang ada di Kota Bandar Lampung, akan tetapi ditentukan menggunakan rumus slovin.

4.2 Hasil Analisis Data

Setelah dilakukan pengolahan data dan dilakukan uji statistik menggunakan SPSS 20, maka hasil penelitian yang diperoleh dari data variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

4.2.1 Statistik Deskriptif

Dalam kuesioner penelitian ini terdapat bagian pernyataan-pernyataan dalam bentuk skala *likert* untuk masing-masing variabel, baik itu variabel dependen maupun independen yang digunakan dalam penelitian ini. Pernyataan-pernyataan tersebut berhubungan dengan Pemahaman Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah dan Hukum, Nasionalisme, Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak. Dimana dalam kuesioner tersebut terdapat 30 pernyataan yang terbagi yakni 5 pernyataan yang digunakan untuk mewakili variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak, 5 pernyataan digunakan untuk mewakili variabel independen yaitu Pemahaman Wajib Pajak, 5 pernyataan

digunakan untuk mewakili variabel independen yaitu Sanksi Perpajakan, 5 pernyataan digunakan untuk mewakili variabel independen yaitu Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah dan Hukum, 5 pernyataan digunakan untuk mewakili variabel independen yaitu Nasionalisme, dan 5 pernyataan digunakan untuk mewakili variabel independen yaitu Kesadaran Wajib Pajak. Pernyataan tersebut kiranya dapat mewakili setiap variabel baik variabel dependen maupun variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini.

Dalam kuesioner ini responden diminta untuk memberikan penilaian terhadap pandangan mereka mengenai Pemahaman Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah dan Hukum, Nasionalisme, Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Berwirausaha dengan menggunakan skala *likert* dengan nilai 1 sampai dengan 5, dimana 1 menunjukkan sangat tidak setuju, 2= tidak setuju, 3= netral, 4= setuju dan 5= sangat setuju. Hasil statistik deskriptif tabel 4.8 sebagai berikut :

Tabel 4.8
Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pemahaman Wajib Pajak	100	14	25	20.68	2.291
Sanksi Perpajakan	100	8	25	18.92	3.004
Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah dan Hukum	100	9	25	17.11	3.609
Nasionalisme	100	12	25	18.95	2.921
Kesadaran Wajib Pajak	100	14	25	20.51	2.298
Kepatuhan Wajib Pajak	100	14	25	21.13	2.460
Valid N (listwise)	100				

Sumber : Olah data SPSS V.20, 2018

Berdasarkan tabel 4.8 statistik deskriptif diatas dapat diketahui bahwa jumlah pengamatan (N) dari penelitian ini adalah sebanyak 100 data. Maka dapat penulis jelaskan sebagai berikut:

1. Variabel dependen untuk kepatuhan wajib pajak diperoleh rata-rata sebesar 21,13 dengan nilai tertinggi 25, dan nilai terendah sebesar 14 serta standar deviasinya 2,460. Hal ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan untuk kepatuhan wajib pajak memiliki hasil baik karena standar deviasi mencerminkan penyimpangan lebih rendah dari nilai mean (Ghozali,2011).
2. Rata-rata *mean* untuk variabel bebas (independen) yaitu :
 - a. Pemahaman Wajib Pajak memperoleh nilai rata-rata (*mean*) adalah sebesar 20,68 dengan nilai tertinggi 25 dan nilai terendah sebesar 14 serta standar deviasinya 2,291. Hal ini berarti Pemahaman Wajib Pajak memiliki hasil yang baik karena standar deviasi mencerminkan penyimpangan lebih rendah dari nilai rata-rata.
 - b. Sanksi Perpajakan memperoleh nilai rata-rata (*mean*) adalah sebesar 18,92 dengan nilai tertinggi 25 dan nilai terendah sebesar 8 serta standar deviasinya 3,004. Hal ini berarti Sanksi Perpajakan memiliki hasil yang baik karena standar deviasi mencerminkan penyimpangan lebih rendah dari nilai rata-rata.
 - c. Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah dan Hukum memperoleh nilai rata-rata (*mean*) adalah sebesar 17,11 dengan nilai tertinggi 25 dan nilai terendah sebesar 9 serta standar deviasinya 3,609. Hal ini berarti Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah dan Hukum memiliki hasil yang baik karena standar deviasi mencerminkan penyimpangan lebih rendah dari nilai rata-rata.
 - d. Nasionalisme memperoleh nilai rata-rata (*mean*) adalah sebesar 18,95 dengan nilai tertinggi 25 dan nilai terendah sebesar 12 serta standar deviasinya 2,921. Hal ini berarti Nasionalisme memiliki hasil yang baik karena standar deviasi mencerminkan penyimpangan lebih rendah dari nilai rata-rata.

- e. Kesadaran Wajib Pajak memperoleh nilai rata-rata (*mean*) adalah sebesar 20,51 dengan nilai tertinggi 25 dan nilai terendah sebesar 14 serta standar deviasinya 2.298. Hal ini berarti Nasionalisme memiliki hasil yang baik karena standar deviasi mencerminkan penyimpangan lebih rendah dari nilai rata-rata.

4.2.2 Hasil Uji Kualitas Data

4.2.2.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Apabila Instrumen tersebut mampu untuk mengukur apa yang diukur, maka disebut valid dan sebaliknya apabila tidak mampu untuk mengukur apa yang diukur, maka tidak dinyatakan valid (Sudarmanto, 2013). Pengujian validitas dalam penelitian ini menggunakan *pearson correlation* yaitu dengan cara mengkorelasikan antara skor setiap item pernyataan dengan total skor setiap responden. Suatu instrumen atau angket dinyatakan valid atau dianggap memenuhi syarat apabila harga koefisien korelasi yang diperoleh dari analisis > dari harga koefisien korelasi pada tabel (Sudarmanto, 2013). Hasil uji validitas dapat dilihat pada tabel 4.9 sebagai berikut :

Tabel 4.9
Hasil Uji Validitas

Variabel	Indikator	Koefesien r Hitung	Koefesien r Tabel	Kesimpulan
Pemahaman Wajib Pajak	Y.1	0,351	0,165	Valid
	Y.2	0,472	0,165	Valid
	Y.3	0,323	0,165	Valid
	Y.4	0,357	0,165	Valid
	Y.5	0,461	0,165	Valid
Sanski Perpajakan	X1.1	0,465	0,165	Valid

	X1.2	0,468	0,165	Valid
	X1.3	0,340	0,165	Valid
	X1.4	0,356	0,165	Valid
	X1.5	0,352	0,165	Valid
Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah dan Hukum	X2.1	0,503	0,165	Valid
	X2.2	0,597	0,165	Valid
	X2.3	0,374	0,165	Valid
	X2.4	0,444	0,165	Valid
	X2.5	0,311	0,165	Valid
Nasionalisme	X3.1	0,417	0,165	Valid
	X3.2	0,375	0,165	Valid
	X3.3	0,359	0,165	Valid
	X3.4	0,188	0,165	Valid
	X3.5	0,259	0,165	Valid
Kesadaran Wajib Pajak	X4.1	0,455	0,165	Valid
	X4.2	0,634	0,165	Valid
	X4.3	0,324	0,165	Valid
	X4.4	0,656	0,165	Valid
	X4.5	0,473	0,165	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak	X5.1	0,415	0,165	Valid
	X5.2	0,293	0,165	Valid
	X5.3	0,601	0,165	Valid
	X5.4	0,353	0,165	Valid
	X5.5	0,366	0,165	Valid

Sumber: Data Primer yang diolah (2018)

Berdasarkan Tabel 4.9 dapat disimpulkan dari hasil uji korelasi *product moment* diperoleh hasil bahwa semua instrumen penelitian memiliki hasil r hitung $>$ r table dan dinyatakan valid sehingga dapat digunakan dalam penelitian ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa semua instrumen penelitian telah memenuhi syarat validitas data.

4.2.2.2 Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas instrumen dapat dilakukan dengan menggunakan metode belah dua (*Split Half Method*). Suatu instrumen penelitian atau alat ukur dikatakan memiliki reliabilitas yang tinggi atau baik apabila instrumen penelitian atau alat ukur tersebut selalu memberikan hasil yang sama ketika digunakan berkali – kali, baik oleh peneliti yang sama maupun oleh peneliti yang berbeda (Sudarmanto, 2013). Variabel dapat dikatakan reliabel jika r hitung $>$ r tabel. Hasil uji Reliabilitas instrument dapat dilihat pada tabel 4.10 berikut ini :

Tabel 4.10
Hasil Uji Reliabilitas

Reliability Statistics		
	Value	.708
Cronbach's Alpha	Part 1 N of Items	15 ^a
	Value	.702
	Part 2 N of Items	15 ^b
	Total N of Items	30
Correlation Between Forms		.708
Spearman-Brown Coefficient	Equal Length	.829
	Unequal Length	.829
Guttman Split-Half Coefficient		.829

a. The items are: P1 , P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15.

b. The items are: P16, P17, P18, P19, P20, P21, P22, P23, P24, P25, P26, P27, P28, P29, P30.

Sumber: Data Primer yang diolah (2018)

Berdasarkan tabel 4.10 diperoleh hasil bahwa koefisien alpha dari Cronbach untuk 15 pernyataan atau item bagian pertama sebesar 0,708 sedangkan koefisien alpha dari Cronbach untuk 15 pertanyaan selanjutnya atau item bagian kedua sebesar 0,702. Pembuatan kelompok atau pembelahan menjadi dua didasarkan kelompok nomor kecil dan kelompok nomor besar yaitu nomor 1-15 sebagai kelompok pertama dan nomor 16-30 sebagai kelompok kedua.

Jadi kesimpulannya hasil uji angket atau instrument setelah dianalisis menunjukkan harga koefisien belah dua dari Guttman Split –Half Coefficient sebesar 0,829 sedangkan harga koefisien korelasi tabel sebesar 0,196. Menggunakan ukuran atau kriteria tersebut menunjukkan r hitung $>$ r tabel dengan metode belah dua demikian dapat dinyatakan bahwa angket atau instrument tersebut reliabel.

4.3.3 Uji Asumsi Klasik

4.3.3.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2011). Adapun uji statistik yang digunakan pada penelitian ini adalah uji *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test*, dengan taraf signifikan 0,05 atau 5%. Jika signifikan yang dihasilkan $>$ 0,05 maka distribusi datanya dikatakan normal. Sebaliknya jika signifikan yang dihasilkan $<$ 0,05 maka data tidak terdistribusi secara normal. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel 4.11 dibawah ini :

Tabel 4.11
Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	1.98362484
Most Extreme Differences	Absolute	.060
	Positive	.052
	Negative	-.060
Kolmogorov-Smirnov Z		.602
Asymp. Sig. (2-tailed)		.862

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data Primer yang diolah (2018)

Berdasarkan Tabel 4.11 diatas dapat dijelaskan bahwa besarnya angka *asymptSig* (2-tailed) menunjukkan nilai 0,862 lebih besar dari tingkat *alpha* yang ditetapkan (5%) yang artinya bahwa seluruh data dapat dikatakan berdistribusi normal.

4.3.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk membuktikan atau menguji ada tidaknya hubungan yang linear antara variabel bebas satu dengan variabel bebas yang lainnya (Sudarmanto, 2013). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Salah satu cara untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi dapat dilihat dari nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Apabila harga koefisien VIF untuk masing – masing variabel independen < 10 maka tidak terjadi multikolinearitas, dan sebaliknya apabila harga koefisien VIF untuk masing – masing variabel independen >10, maka variabel tersebut diindikasikan memiliki gejala multikolinearitas

(Sudarmanto, 2013). Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada Tabel 4.12 dibawah ini :

Tabel 4.12
Uji Multikolinieritas

Model	Sig.	Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
(Constant)	.000		
Pemahaman Wajib Pajak	.030	.113	8.876
Sanksi Perpajakan	.002	.130	7.691
Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah dan Hukum Nasionalisme	.446	.963	1.038
Kesadaran Wajib Pajak	.040	.126	7.953
	.000	.113	8.826

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber data : Olah data SPSS V.20, 2018

Berdasarkan Tabel 4.12 diatas hasil analisis menggunakan *Variance inflation factor* (VIF) menunjukkan bahwa harga koefisien VIF untuk semua variabel < 10 artinya tidak terdapat hubungan antara variabel-variabel independen (tidak terjadi multikolinieritas).

4.3.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah variasi residual absolute sama atau tidak sama untuk semua pengamatan (Sudarmanto, 2013). Uji ini dapat dianalisis melalui uji glejser dengan melihat koefisien signifikansi, jika tingkat koefisiensi signifikansi lebih besar dari alpha yang ditetapkan (5%) maka dinyatakan tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel 4.13 dibawah ini:

Tabel 4.13
Uji Heteroskedastisitas

Model	T	Sig.
(Constant)	1.400	.165
Pemahaman Wajib Pajak	-.035	.972
Sanksi Perpajakan	.191	.849
1 Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah dan Hukum	1.101	.274
Nasionalisme	-.258	.797
Kesadaran Wajib Pajak	-.189	.851

a. Dependent Variable: Ares

Sumber : Olah data SPSS V.20, 2018

Berdasarkan tabel 4.13 diketahui nilai signifikansi masing-masing variabel bebas lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang diperoleh tidak terdapat adanya heteroskedastisitas.

4.3.3.3 Uji Linieritas

Uji Linearitas adalah suatu analisis guna menguji atau mengetahui apakah hubungan antar satu variabel dengan variabel lainnya memiliki kecenderungan mengikuti garis lurus atau tidak (Sudarmanto, 2013). Uji ini biasanya digunakan sebagai prasyarat dalam analisis korelasi atau regresi linear. Pengujian pada SPSS dengan menggunakan *Test for Linearity* dengan pada taraf signifikansi 0,05. Dua variabel dikatakan mempunyai hubungan yang linear bila signifikansi (*Linearity*) kurang dari 0,05. Hasil uji linieritas dapat dilihat pada tabel 4.14 dibawah ini:

Tabel 4.14
Uji Linieritas

No	Variabel Penelitian	Sig.	Kondisi	Kesimpulan
1	Pemahaman Wajib Pajak	0.002	Sig. < 0,05	Linear
2	Sanksi Perpajakan	0.000	Sig. < 0,05	Linear
3	Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah dan Hukum	0.502	Sig. > 0,05	Tidak Linear
4	Nasionalisme	0.001	Sig. < 0,05	Linear
5	Kesadaran Wajib Pajak	0.000	Sig. < 0,05	Linear

Sumber : Olah data SPSS V.20, 2018

Berdasarkan tabel 4.14 diketahui hasil bahwa untuk variabel Pemahaman Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Nasionalisme, dan Kesadaran Wajib Pajak dapat dinyatakan mempunyai hubungan yang linear karena memiliki signifikan linearity < 0,05. Sedangkan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah dan Hukum dinyatakan tidak mempunyai hubungan yang linear karena memiliki signifikan linearity > 0,05.

4.4 Hasil Pengujian Hipotesis

4.4.1 Uji Adjusted R (Koefisien Determinan)

Nilai koefisien determinasi menunjukkan seberapa jauh kemampuan variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen. Jika *Adjusted R Square* adalah sebesar 1 berarti fluktuasi variabel dependen seluruhnya dapat dijelaskan oleh variabel independen dan tidak ada faktor lain yang menyebabkan fluktuasi dependen. Nilai *Adjusted R Square* berkisar hampir 1, berarti semakin kuat kemampuan variabel independen dapat menjelaskan variabel

dependen. Sebaliknya, jika nilai *Adjusted R Square* semakin mendekati angka 0 berarti semakin lemah kemampuan variabel independen dapat menjelaskan fluktuasi variabel dependen.

Tabel 4.15
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.592 ^a	.350	.315	2.036

a. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak , Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah dan Hukum, Sanksi Perpajakan , Nasionalisme, Pemahaman Wajib Pajak

Sumber data : Olah data SPSS V.20, 2018

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada tabel 4.15 diketahui bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,315 atau 31,5% yang berarti bahwa variabel independen (Kesadaran Wajib Pajak , Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah dan Hukum, Sanksi Perpajakan , Pemahaman Wajib Pajak , dan Nasionalisme) dapat menjelaskan variabel dependen (kepatuhan wajib pajak) dan sisanya sebesar 68,5% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diajukan dalam penelitian ini.

4.4.2 Uji Kelayakan Model F

Uji kelayakan model dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi layak atau tidak untuk digunakan. Pengujian ini menggunakan statistik F yang terdapat pada tabel Anova. Jika probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi ($Sig < 0,05$) maka model penelitian dapat digunakan atau model tersebut sudah layak. Jika probabilitas lebih besar dari tingkat signifikansi ($Sig > 0,05$) maka model penelitian tidak dapat digunakan atau model tersebut tidak layak. Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 4.16**Uji F****ANOVA^a**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	209.768	5	41.954	10.124	.000 ^b
Residual	389.542	94	4.144		
Total	599.310	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak , Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah dan Hukum, Sanksi Perpajakan , Nasionalisme, Pemahaman Wajib Pajak

Sumber data : Olah data SPSS V.20, 2018

Dari tabel 4.16 ANOVA diperoleh F hitung 10.124 dengan probabilitas 0,000. Nilai F tabel yaitu 2,31. Jadi $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($10.124 > 2,31$) atau $sig < 5\%$ ($0,000 < 0,05$), maka model regresi layak digunakan untuk memprediksi variabel kepatuhan wajib pajak.

4.4.3 Uji Regresi

Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan persamaan regresi linear berganda. Hasil analisis regresi linier berganda dapat dilihat pada tabel 4.17 dibawah ini :

Tabel 4.17
Uji Regresi
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
(Constant)	8.828	2.231
Pemahaman Wajib Pajak	-.585	.266
Sanksi Perpajakan	.599	.189
1 Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah dan Hukum	.044	.058
Nasionalisme	-.411	.198
Kesadaran Wajib Pajak	.980	.264

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Olah data SPSS V.20, 2018

Persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y = 8.828 - 0.585X_1 + 0,599X_2 + 0,044X_3 - 0,411X_4 + 0,980X_5 + e$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB

X₁ = Pemahaman Wajib Pajak Mengenai Peraturan Perpajakan

X₂ = Sanksi Perpajakan

X₃ = Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah dan Hukum

X₄ = Nasionalisme

X₅ = Kesadaran Wajib Pajak

α = Konstanta

e = Variabel Gangguan

Dari persamaan regresi diatas maka dapat dijelaskan bahwa :

1. Konstanta dalam penelitian ini sebesar 8.828 menunjukkan bahwa jika variabel bebas diasumsikan tetap atau sama dengan nol maka nilai variabel terikat sebesar 8.828.
2. Nilai koefisien variabel Pemahaman Wajib Pajak (X1) dalam penelitian ini sebesar -0,585 yang berarti bahwa jika Pemahaman Wajib Pajak naik sebesar satu satuan maka variabel nilai Kepatuhan Wajib Pajak akan turun sebesar -0,585 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.
3. Nilai koefisien variabel Sanksi Perpajakan (X2) dalam penelitian ini sebesar 0,599 yang berarti bahwa jika Sanksi Perpajakan naik sebesar satu satuan menyebabkan nilai Kepatuhan Wajib Pajak juga akan naik sebesar 0,599.
4. Nilai koefisien variabel Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah dan Hukum (X3) dalam penelitian ini sebesar 0,044 yang berarti bahwa jika Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah dan Hukum naik sebesar satu satuan menyebabkan nilai Kepatuhan Wajib Pajak juga akan naik sebesar 0,044.
5. Nilai koefisien variabel Nasionalisme (X4) dalam penelitian ini sebesar -0,411 yang berarti bahwa jika Nasionalisme naik sebesar satu satuan maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak akan turun sebesar -0,411 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.
6. Nilai koefisien variabel Kesadaran Wajib Pajak (X5) dalam penelitian ini sebesar 0,980 yang berarti bahwa jika Sanksi Perpajakan naik sebesar satu satuan menyebabkan nilai Kepatuhan Wajib Pajak juga akan naik sebesar 0,980.

4.4.4 Uji Hipotesis T

Menurut Ghozali (2011) uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variable independen secara individual dalam menerangkan variable dependen. Bila nilai signifikan $t < 0,05$ maka H_0 ditolak artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen. Apabila nilai signifikan $t > 0,05$ maka H_0 diterima artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 4.18 dibawah ini :

Tabel 4.18
Uji T
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	8.828	2.231		3.957	.000
Pemahaman Wajib Pajak	-.585	.266	-.544	-2.198	.030
Sanksi Perpajakan	.599	.189	.731	3.170	.002
1 Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah dan Hukum	.044	.058	.065	.765	.446
Nasionalisme	-.411	.198	-.489	-2.083	.040
Kesadaran Wajib Pajak	.980	.264	.916	3.707	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Olah data SPSS V.20, 2018

Berdasarkan hasil uji hipotesis t pada tabel 4.18 diketahui bahwa :

1. Nilai signifikan Pemahaman Wajib Pajak sebesar 0.030 yang berarti bahwa nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan

bahwa Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Nilai signifikan Sanksi Perpajakan sebesar 0,002 yang berarti bahwa nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Nilai signifikan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah dan Hukum sebesar 0,446 yang berarti bahwa nilai tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah dan Hukum tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Nilai signifikan Nasionalisme sebesar 0,040 yang berarti bahwa nilai tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa Nasionalisme berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
5. Nilai signifikan Kesadaran Wajib Pajak sebesar 0.000 yang berarti bahwa nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.4. Pembahasan

4.4.1 Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak mengenai peraturan perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan karena Pemahaman Wajib Pajak di Kota Bandar Lampung rata-rata memiliki pemahaman mengenai peraturan perpajakan yang menggambarkan pengetahuan masyarakat tentang perpajakan, baik itu soal tarif pajak maupun manfaat pajak itu sendiri. Umumnya wajib pajak telah mengetahui dan memahami undang-undang mengenai PBB, menghitung pajak sesuai peraturan, dan mengetahui pembayaran PBB untuk pembangunan daerah. Wajib pajak diharapkan semakin meningkatkan pemahaman tentang peraturan perpajakan yang berlaku sehingga dapat meningkatkan pembangunan daerah melalui perpajakan. Berdasarkan teori

atribusi, sanksi pemahaman wajib pajak merupakan penyebab internal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Menurut Adiasa (2013) yang menyatakan bahwa pengaruh pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Hal ini didukung oleh penelitian Purnamasari, dkk (2016) yang menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

4.4.2 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati atau dipatuhi atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dapat dijelaskan bahwa sanksi perpajakan merupakan penyebab eksternal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Berdasarkan teori atribusi, sanksi perpajakan merupakan penyebab eksternal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Menurut Rustyaningsih (2011), Wulandari dan Suyanto (2014) yang menyimpulkan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Argumentasi yang dipakai adalah semakin berat sanksi perpajakan yang dikenakan bagi wajib pajak yang melanggar peraturan maka wajib pajak semakin takut untuk melanggar sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Hal ini didukung oleh penelitian Purnamasari, dkk (2016) yang menyatakan bahwa Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

4.4.3 Pengaruh Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah dan Hukum Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah dan Hukum tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan Tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak, dikarenakan adanya wajib pajak yang belum percaya terhadap aparat pemerintah maupun sistem hukum yang berjalan. Wajib pajak merasa bahwa dengan mempertimbangkan informasi-informasi yang ada, seperti banyaknya pemberitaan penggunaan dana yang tidak sesuai dengan semestinya seperti kasus korupsi, kasus penggelapan pajak, serta berbagai kasus lainnya yang berkaitan dengan ketidakadilan dalam sistem hukum yang berjalan. Dimana hal tersebut membuat wajib pajak berpikir dengan cara yang rasional bahwa pajak yang dibayarnya kepada negara tidak digunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat sehingga muncul rasa kurang percaya wajib pajak dan memengaruhi terhadap perilaku wajib pajak untuk bertindak tidak patuh dalam membayar PBB. Berdasarkan teori atribusi, tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum merupakan faktor eksternal yang akan mempertimbangkan tindakan yang harus diambilnya sesuai pikiran yang rasional. Persepsi wajib pajak mengenai kepercayaannya pada pemerintah dan hukum merupakan alasan dari aksi yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Menurut Handayani, dkk (2012) berkesimpulan bahwa tingkat kepercayaan kepada sistem pemerintah dan hukum tidak berpengaruh terhadap kemauan wajib pajak untuk membayar pajak. Hal ini didukung oleh penelitian Purnamasari, dkk (2016) yang menyatakan bahwa tingkat kepercayaan kepada sistem pemerintah dan hukum tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

4.4.4 Pengaruh Nasionalisme Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Nasionalisme berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan bahwa Wajib pajak memiliki rasa kebanggaan menjadi bagian warga negara Indonesia, mereka bertanggungjawab dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak dan turut berperan dalam pembangunan. Wajib pajak menyadari bahwa ketaatan membayar pajak merupakan tindakan sebagai warga negara yang baik serta wujud cinta pada tanah air. Kemudian wajib pajak menyadari dengan membayar pajak membantu mewujudkan tujuan negara. Oleh karena itu, wajib pajak diharapkan tetap memiliki rasa nasionalisme yang tinggi sehingga dapat meningkatkan pendapatan negara yang dapat membantu terhadap pemenuhan kesejahteraan masyarakat melalui pembayaran pajak. Berdasarkan teori atribusi, nasionalisme merupakan penyebab internal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Menurut penelitian Intansari (2017) dimana kebanggaan nasional berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak untuk patuh pada kewajiban perpajakan. Argumentasi yang dipakai adalah Wajib pajak memiliki rasa kebanggaan menjadi bagian warga negara Indonesia untuk membangun dan memajukan bangsa dan negaranya sehingga wajib pajak akan melaksanakan kewajiban perpajakannya dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Hal ini didukung oleh penelitian Purnamasari, dkk (2016) yang menyatakan bahwa Nasionalisme berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

4.4.5 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan oleh

mengertinya wajib pajak tentang pengetahuan peraturan perpajakan karena semakin tinggi kesadaran Wajib Pajak membayar pajak, maka akan semakin tinggi kemauan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Berdasarkan teori atribusi, kesadaran wajib pajak merupakan penyebab internal yang dapat mempengaruhi kesadaran akan kepatuhan dalam membayar pajak tepat waktu. Menurut penelitian Wardani, Dewi Kusuma (2015) dimana kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Hal ini didukung oleh penelitian Putri, Aldina Widyasakana (2017) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.